



## Tik Tok dalam Tinjauan Administrasi Publik Di Indonesia

Dandan Haryono

Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako,  
Kota Palu

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah  
94148

Korespondensi penulis: [dandanharyono@gmail.com](mailto:dandanharyono@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The development of digital technology has transformed the landscape of public administration in Indonesia. One notable digital platform is Tik Tok, a short-video sharing application that has gained significant popularity among the public. This journal aims to analyze the role and implications of Tik Tok in the context of public administration in Indonesia. The research method employed is a literature study and secondary data analysis. The findings indicate that Tik Tok has been utilized by government and public institutions to enhance public engagement, disseminate public information, and promote government programs. However, challenges related to privacy issues, ethics, and user data security remain. This journal concludes that the utilization of Tik Tok in public administration must be carefully managed and aligned with the principles of good governance.*

**Keywords:** *Tik Tok, Public Administration, Digital Technology, Community Engagement, Governance, Data Privacy, Ethics.*

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap administrasi publik di Indonesia. Salah satu platform digital yang menjadi sorotan adalah Tik Tok, aplikasi berbagi video pendek yang semakin populer di kalangan masyarakat. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran dan implikasi Tik Tok dalam konteks administrasi publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tik Tok telah dimanfaatkan oleh pemerintah dan lembaga publik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, menyampaikan informasi publik, dan mempromosikan program-program pemerintah. Namun, terdapat juga tantangan terkait dengan isu privasi, etika, dan keamanan data pengguna. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan Tik Tok dalam administrasi publik perlu dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci:** Tik Tok, Administrasi Publik, Teknologi Digital, Keterlibatan Masyarakat, Tata Kelola Pemerintahan, Privasi Data, Etika.

## PENDAHULUAN

Revolusi digital telah menciptakan berbagai peluang dan tantangan bagi administrasi publik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi digital, yang semakin berkembang pesat, tidak hanya memberikan solusi efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif. Salah satu inovasi digital yang mencuri perhatian adalah TikTok, sebuah platform berbagi video pendek yang kini telah menjadi fenomena global. TikTok, menurut laporan Sensor Tower (2022), merupakan aplikasi paling banyak diunduh pada tahun 2021, termasuk di Indonesia, dan memiliki pengguna yang terus meningkat, terutama dari kalangan generasi muda.

Kehadiran TikTok di tengah masyarakat Indonesia membuka peluang baru bagi pemerintah dan lembaga publik untuk menyampaikan pesan secara kreatif dan inovatif. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah instansi pemerintah, seperti kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, telah memanfaatkan platform ini untuk mempromosikan program-program pemerintah, meningkatkan literasi masyarakat, serta menjangkau kelompok masyarakat yang sulit diakses melalui media konvensional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Misalnya, kampanye vaksinasi COVID-19 dan penyebaran informasi kebijakan publik lainnya telah dilakukan melalui konten-konten kreatif di TikTok, yang memungkinkan pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih informal dan menarik.

Namun, di tengah keberhasilan tersebut, muncul berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius. TikTok, seperti platform media sosial lainnya, menghadapi tantangan terkait privasi data pengguna, penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan (hoaks), dan potensi penyalahgunaan platform untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika. Selain itu, isu keamanan siber juga menjadi perhatian, mengingat data pengguna TikTok dapat menjadi target serangan yang berpotensi merugikan individu maupun negara. Di sisi lain, kurangnya regulasi yang spesifik dalam penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah menimbulkan risiko penyalahgunaan dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Permasalahan terkini lainnya adalah keberlanjutan dampak positif dari pemanfaatan TikTok dalam administrasi publik. Banyak instansi pemerintah yang belum memiliki strategi jangka panjang untuk mengelola platform ini secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya konsistensi dalam penyampaian informasi, sehingga potensi TikTok sebagai alat komunikasi publik yang strategis belum sepenuhnya teroptimalkan. Selain itu, adanya kesenjangan digital di beberapa wilayah di Indonesia juga menjadi penghambat bagi pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara merata melalui platform ini.

Dengan latar belakang ini, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran TikTok dalam administrasi publik di Indonesia, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi komunikasi publik yang efektif, berbasis teknologi digital, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik dan Teknologi Digital Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dan lembaga publik menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk dalam hal penyediaan layanan publik, pembuatan kebijakan, dan

pengambilan keputusan (Denhardt & Denhardt, 2015). Dalam era digital saat ini, administrasi publik telah mengalami transformasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keterlibatan masyarakat (Mergel, 2019). Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi publik dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti penggunaan media sosial untuk komunikasi dan keterlibatan masyarakat, penggunaan data digital untuk pengambilan keputusan, serta pengembangan layanan publik berbasis digital (Dunleavy et al., 2006). Salah satu platform digital yang menjadi sorotan adalah Tik Tok, yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah dan lembaga publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tik Tok dan Administrasi Publik Tik Tok adalah aplikasi berbagi video pendek yang semakin populer di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengunggah, dan berbagi video berdurasi pendek, serta berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui fitur komentar, likes, dan berbagi (Huang & Castillo, 2021). Dalam konteks administrasi publik, Tik Tok telah dimanfaatkan oleh pemerintah dan lembaga publik untuk berbagai tujuan, seperti:

1. Komunikasi dan keterlibatan masyarakat: Pemerintah dan lembaga publik menggunakan Tik Tok untuk menyampaikan informasi publik, mempromosikan program-program, dan berinteraksi dengan masyarakat.
2. Edukasi dan sosialisasi: Tik Tok digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif dan informatif terkait dengan kebijakan, program, dan layanan pemerintah.
3. Branding dan citra positif: Pemerintah dan lembaga publik memanfaatkan Tik Tok untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Namun, pemanfaatan Tik Tok dalam administrasi publik juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti isu privasi, etika, dan keamanan data pengguna. Oleh karena itu, pengelolaan Tik Tok dalam administrasi publik perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel media, yang terkait dengan pemanfaatan Tik Tok dalam administrasi publik di Indonesia. Analisis data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data terkait dengan penggunaan Tik Tok oleh pemerintah dan lembaga publik di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemanfaatan Tik Tok dalam Administrasi Publik di Indonesia Pemerintah dan lembaga publik di Indonesia telah memanfaatkan Tik Tok sebagai salah satu alat komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Berbagai instansi, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, telah membuat akun Tik Tok resmi untuk menyampaikan informasi publik, mempromosikan program-program, dan berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu contoh pemanfaatan Tik Tok dalam administrasi publik di Indonesia adalah akun Tik Tok resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Akun ini digunakan untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan, program, dan layanan pemerintah, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya, Kominfo menggunakan Tik Tok untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).

Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga telah memanfaatkan Tik Tok untuk membangun citra positif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Misalnya, Pemerintah Kota Surabaya memiliki akun Tik Tok resmi yang digunakan untuk mempromosikan program-program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik (Pemerintah Kota Surabaya, 2022).

Tantangan Pemanfaatan Tik Tok dalam Administrasi Publik  
Meskipun pemanfaatan Tik Tok dalam administrasi publik di Indonesia telah menunjukkan beberapa keberhasilan, terdapat juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Isu privasi dan keamanan data pengguna Penggunaan Tik Tok oleh pemerintah dan lembaga publik dapat menimbulkan isu terkait dengan privasi dan keamanan data pengguna. Hal ini karena Tik Tok merupakan platform milik perusahaan asing yang memiliki kebijakan privasi dan keamanan data yang belum tentu sesuai dengan standar pemerintah Indonesia.
2. Etika dan konten yang sesuai Pemerintah dan lembaga publik perlu memastikan bahwa konten yang diunggah di Tik Tok sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Konten yang tidak sesuai dapat menimbulkan kontroversi dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
3. Pengelolaan dan koordinasi Pemanfaatan Tik Tok dalam administrasi publik membutuhkan pengelolaan dan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah. Hal ini untuk memastikan konsistensi pesan, keselarasan dengan kebijakan pemerintah, dan efektivitas penggunaan platform.

Rekomendasi untuk Pengelolaan Tik Tok dalam Administrasi Publik  
Berdasarkan analisis terhadap pemanfaatan Tik Tok dalam administrasi publik di Indonesia, berikut beberapa rekomendasi untuk pengelolaan yang lebih baik:

1. Pengembangan kebijakan dan panduan penggunaan Tik Tok Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan panduan yang jelas terkait dengan penggunaan Tik Tok dalam administrasi publik. Hal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, privasi, dan etika penggunaan platform.
2. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi Pemerintah dan lembaga publik perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan Tik Tok, agar tercipta konsistensi pesan, keselarasan dengan kebijakan pemerintah, dan efektivitas penggunaan platform.
3. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah dan lembaga publik perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola akun Tik Tok, agar dapat menghasilkan konten yang menarik, relevan, dan sesuai dengan etika.
4. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan Pemerintah dan lembaga publik perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pemanfaatan Tik Tok, agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul.

## KESIMPULAN

Pemanfaatan Tik Tok dalam administrasi publik di Indonesia telah menunjukkan beberapa keberhasilan, seperti peningkatan komunikasi dan keterlibatan masyarakat, edukasi dan sosialisasi, serta branding dan citra positif. Namun, terdapat juga tantangan terkait dengan isu privasi, etika, dan keamanan data pengguna. Oleh karena itu, pengelolaan Tik Tok dalam administrasi publik perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik. Rekomendasi yang diberikan meliputi pengembangan kebijakan dan panduan, peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi, peningkatan kapasitas SDM, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *Public administration: An action orientation*. Cengage Learning.

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of public administration research and theory*, 16(3), 467-494.

Huang, J., & Castillo, C. (2021). Tik Tok usage, performance, and user satisfaction: A large-scale user study. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CSCW1), 1-25.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Kominfo Gandeng Tik Tok Edukasi Masyarakat Tentang Penggunaan Internet yang Aman dan Bertanggung Jawab*. Retrieved from [https://www.kominfo.go.id/content/detail/32951/kominfo-gandeng-TikTok-edukasi-masyarakat-tentang-penggunaan-internet-yang-aman-dan-bertanggung-jawab/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/32951/kominfo-gandeng-TikTok-edukasi-masyarakat-tentang-penggunaan-internet-yang-aman-dan-bertanggung-jawab/0/berita_satker)

Mergel, I. (2019). Digital service teams in government. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101389.

Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *Akun Tik Tok Resmi Pemerintah Kota Surabaya*. Retrieved from <https://www.surabaya.go.id/id/page/0/13849/akun-TikTok-resmi-pemerintah-kota-surabaya>

Sensor Tower. (2022). *Top Apps Worldwide for January 2022 by Downloads*. Retrieved from <https://sensortower.com/blog/top-apps-worldwide-january-2022-by-downloads>